

Vol. 1, No. 2

Agustus 2002 - Oktober 2002

Penelitian Kelas
Oleh: H.E.T. Ruseffendi

Penelitian Tentang Manfaat Tujuan Pembelajaran Khusus
dalam Proses Belajar Mengajar
Oleh: H. Otong Kardisaputra

Akuntabilitas dan Standarisasi Kualitas Perguruan Tinggi Swasta
di Daerah
Oleh: H.A. Kartiwa

Pembentukan Pengetahuan Sains, Teknologi, dan Masyarakat
dalam Pendidikan IPA
Oleh: Reviandari Widyatiningtyas

Peranan Pertanyaan Terhadap Kekuatan Retensi
dalam Pembelajaran Sains pada Siswa SMU
Oleh: Taufik Rahman

Sikap Mengajar Guru Serta Pengaruhnya dalam Pendidikan
Oleh: Sungging Handoko

Accelerated Learning: Pendekatan Baru Pembelajaran
Oleh: Eki Baihaki

Aspek-aspek Strategis dalam Penerimaan Mahasiswa Baru
pada Perguruan Tinggi Swasta
Oleh: Asep Hidayat

Salinan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002
Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi

Educare

Jurnal Pendidikan dan Budaya

ISSN 1412-579X

Vol. 1, No. 2

Agustus 2002-Oktober 2002

EDUCARE adalah jurnal ilmiah yang terbit setiap tiga bulan sekali, bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan menyebarkan konsep-konsep pendidikan dan budaya.

DAFTAR ISI

Pelindung: Rektor UNLA. **Penasehat:** Pembantu Rektor I UNLA, dan Ketua Penelitian dan Pengembangan UNLA. **Penanggung Jawab:** Dekan FKIP UNLA. **Tim Asistensi:** Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III FKIP UNLA.

Tim Akhli: Prof. H.E.T. Ruseffendi, S.Pd., M.Sc., Ph.D., Prof. H. Aas Sae-fudin, Drs., M.A., H. Otong Kardisaputra, Drs.

Pemimpin Redaksi: Eki Baihaki, Drs. **Sekretaris:** Ria Herdiana, Dra. **Redak-tur Khusus PIPS:** Ketua Jurusan PIPS FKIP UNLA; Sungging Handoko, Drs., S.H.; Hj. Rita Zahara, Dra. **Redaktur Khusus PMIPA:** Ketua Jurusan PMIPA FKIP UNLA; H.EndiNurgana, Drs.; H. Erman Suherman, Drs., M.Pd. **Sirkulasi:** Budi Rusyanto, S.H. **Tata Usaha:** Staf Tata Usaha FKIP UNLA.

Penerbit: Badan Penerbitan FKIP UNLA. **Percetakan:** C.V. Sarana Cipta Usaha. **Setting dan Layout:** 3Nur Studio
Terbitan Pertama: 02 Mei 2002

PENELITIAN KELAS

Oleh: H.E.T. Ruseffendi 3

PENELITIAN TENTANG MANFAAT TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS DALAM PROSES BELAJAR-MENGAJAR

Oleh: H. Otong Kardisaputra 10

AKUNTABILITAS DAN STANDARISASI KUALITAS PERGURUAN TINGGI SWASTA DI DAERAH

Oleh: H.A. Kartiwa 19

PEMBENTUKAN PENGETAHUAN SAINS, TEKNOLOGI, DAN MASYARAKAT DALAM PANDANGAN PENDIDIKAN IPA

Oleh: Reviandari Widyatiningtyas 29

PERANAN PERTANYAAN TERHADAP KEKUATAN RETENSI DALAM PEMBELAJARAN SAINS PADA SISWA SMU

Oleh: Taufik Rahman 37

SIKAP MENGAJAR GURU SERTA PENGARUHNYA DALAM PENDIDIKAN

Oleh: Sungging Handoko 47

ACCELERATED LEARNING: PENDEKATAN BARU PEMBELAJARAN (Dave Meier)

Oleh Eki Baihaki 53

ANALISIS ASPEK-ASPEK STRATEGIS PERGURUAN TINGGI SWASATA DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Oleh: Asep Hidayat 58

SALINAN KEPUTUSAN MENDIKNAS NO. 045/U/2002 TENTANG KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI

..... 74

Redaksi menerima tulisan dengan panjang tulisan maksimal 6000 kata dan sudah ditulis dan dikemas dalam disket dengan format Microsoft Word. Isi tulisan ilmiah populer, hasil penelitian, atau gagasan orisinal pada bidang pendidikan dan budaya. Isi tulisan, secara yuridis formal menjadi tanggung jawab penulis. Naskah yang dikirim ke Redaksi menjadi milik Jurnal Educare.

Alamat Penerbit dan Redaksi:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlangbuana

Jl. Karapitan No. 116 Bandung 40261, Telp. (022) 4215716.

<http://www.e-fkipunla.info>

e-mail: educare-red@telkom.net

PENGANTAR DARI REDAKSI

Seraya memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah pada momentum historis hari Pendidikan Nasional, kami keluarga besar FKIP UNLA dapat menerbitkan Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Budaya yang diberi nama *educare*, yang arti harfiahnya adalah penuntun dan membimbing. Yang diharapkan menjadi penuntun kearah kebaikan dan kebenaran.

Kehadiran Jurnal ini merupakan, bukti nyata adanya komitmen positif keluarga besar FKIP UNLA, dalam memperkokoh dan mengaktualisasikan Visi Misi Unla dan FKIP pada khususnya melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi tengah masyarakat, sekaligus sebagai media yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan budaya tulis dan kultur ilmiah yang merupakan atribut yang melekat dari sebuah Perguruan Tinggi.

Kultur ilmiah akan terbentuk manakala Perguruan Tinggi sebagai intitusi ilmiah dan civitas akademika yang mewujudkan diri sebagai masyarakat ilmiah senantiasa peduli, dan memiliki hasrat terhadap berbagai permasalahan dan mengkajinya secara ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasainya, serta menuangkannya dalam bentuk tulisan.

Pada edisi perdana ini, kami sajikan enam karya tulis ilmiah hasil kajian dari dosen FKIP, terhadap dinamika dan nuansa kehidupan yang sekarang berjalan cepat dan dinamis dari perspektif pendidikan dan budaya. Dan pada edisi perdana ini, kami telah mendapatkan kehormatan dengan diraihnya nomor ISSN (International Standart Serial Number) dari LIPI, setelah kami dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Keinginan kami untuk menyajikan beragam tulisan dan kajian ilmiah dengan kualitas yang lebih baik dan teratur, adalah merupakan tekad kami, maka respon dan kritik bagi penyempurnaan pada edisi berikutnya sangat kami nantikan.

Bandung, 01 Agustus 2002

Redaksi

AKUNTABILITAS DAN STANDARISASI KUALITAS PERGURUAN TINGGI SWASTA DI DAERAH

Oleh: H.A. Kartiwa

Abstrak

Paradigma baru dalam pendidikan tinggi yang mencakup akuntabilitas, kualitas, otonomi, evaluasi diri dan akreditasi pendidikan tinggi yang berkenaan dengan kondisi yang dipersyaratkan masa depan, menuntut aktualisasi keunggulan manusia secara optimal merupakan persoalan yang dihadapi oleh lulusan Perguruan Tinggi. Belum tampilnya lulusan pendidikan tinggi yang memiliki "keunggulan khusus" menjadi tantangan bersama. Pendidikan tidak hanya sekedar mendidik menjadi tenaga siap pakai di pasar kerja, melainkan lebih dari pada itu, yakni membantu peserta didik untuk menjadi "manusia seutuhnya". Untuk itu perlu kiranya ada lembaga yang independen untuk menilai akreditasi Perguruan tinggi tersebut. Kondisi akademik yang kondusif sangat menunjang keberhasilan suatu Perguruan Tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Akuntabilitas dan Standarisasi Perguruan Tinggi Swasta di Daerah merupakan paradigma baru yang merupakan harapan sekaligus tantangan untuk dapat mewujudkannya.

A. Pengantar

Indonesia sebagai suatu negara yang baru berkembang, harus berusaha keras untuk memperbaiki kekurangannya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan jumlah tenaga kerja yang handal. Untuk itu pendidikan tinggi ditantang untuk mampu meningkatkan mutu lulusannya. Agar lulusan pendidikan tinggi dapat menjamin secara maksimal kebutuhan kerja sektor industri maka perlu relevansi program-program yang diselenggarakannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program pendidikan tinggi membutuhkan biaya yang cukup besar; oleh karena itu manajemennya harus efisien dan efektif. Untuk itu di lingkungan perguruan tinggi perlu dikembangkan asas untuk

membuat sistem manajemen yang dinamis disertai akuntabilitas yang tinggi. Penerapan asas otonomi dalam Pendidikan Tinggi merupakan perubahan dari pola manajemen terpusat ke arah pola dengan pusat-pusat pengambilan keputusan yang lebih tersebar. Dengan sistem ini diharapkan manajemen Perguruan Tinggi akan berjalan lebih dinamis, efisien dan efektif.

Secara kuantitatif, lulusan Perguruan Tinggi dalam dekade sekarang ini cukup menggembirakan. Laju peningkatan lulusan Perguruan Tinggi yang tidak diimbangi dengan kesempatan kerja atau keengganan bekerja dari para lulusan di luar sektor Pemerintahan, telah menimbulkan

suatu paradoks: semakin membesarnya gejala “*educated unemployment*”, semakin kuat untuk memperluas fasilitas pendidikan formal. Masalah pengangguran sarjana tersebut tidak terlepas dari menjamurnya jumlah PTS, khususnya PTS yang muncul di daerah-daerah, yang mutu lulusannya tidak sesuai dengan kualifikasi kebutuhan akan tenaga profesional dan akademis untuk pembangunan di berbagai bidang.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi VI DPR tanggal 6 Februari 2002 di Jakarta, Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) Depdiknas, Satriyo Soemantri Brodjonegoro, menilai, sebagian besar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebuah perguruan tinggi. Di Pulau Jawa, mencapai 70 %, sedangkan di luar Pulau Jawa mencapai 90 %. Yang memenuhi syarat minimal sebuah perguruan tinggi, di Pulau Jawa mencapai 30 %, sedangkan PTS di luar Pulau Jawa yang sudah layak hanya 10 %. PTS yang tidak layak terus dilakukan pembinaan, sedangkan yang sudah layak diperkuat menjadi lebih kuat dan diunggulkan. Sedangkan terhadap yang masih lemah dicoba untuk diperkuat, apabila tidak mungkin terpaksa akan dieliminasi atau

ditutup.

Kriteria yang digunakan sebagai persyaratan minimal untuk pendirian sebuah Perguruan Tinggi antara lain adalah unsur dosen, sarana, kelengkapan-kelengkapan, budaya akademik dan jumlah penelitian. Dari pendapat Dirjen Dikti tersebut terlihat betapa lemahnya kualitas PT, khususnya PTS yang ada di Indonesia ini. Untuk itu masih diperlukan pengawasan mutunya agar perguruan tinggi tersebut tidak sampai merugikan lulusannya, karena lulusannya tidak dapat diserap oleh pasar kerja.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkenaan dengan masa depan, menggugah kepedulian masyarakat terhadap peran perguruan tinggi khususnya agar dapat meningkatkan fungsinya secara relevan dengan pembangunan masyarakat. Paradigma baru perguruan tinggi menampilkan pola tetrahedron dalam menggambarkan lima dasar penting perguruan tinggi, yakni, otonomi, kualitas, evaluasi, akreditasi dan akuntabilitas. Paradigma baru tersebut, rupanya akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, dengan mengeluarkan SK Mendiknas, Nomor: 184/u/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan

Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi. SK ini menuntut agar pengelola Perguruan Tinggi memenuhi akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun Pemerintah.

B. Akuntabilitas Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Paradigma baru dalam Pendidikan Tinggi yang mencakup akuntabilitas, kualitas, otonomi, evaluasi dini dan akreditasi pendidikan tinggi yang berkenaan dengan kondisi yang dipersyaratkan masa depan, menuntut aktualisasi keunggulan manusia secara optimal merupakan persoalan yang dihadapi oleh lulusan pendidikan tinggi. Belum tampilnya lulusan pendidikan tinggi yang memiliki "keunggulan khusus" merupakan tantangan bersama. Lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas, tentunya dilahirkan oleh pembinaan dan pendidikan yang berkualitas pula.

Menurut Conny R. Serniawan , (1999: 14-15), dalam kaitan dengan pengembangan manusia ada 2 (dua) pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kemampuan manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development (HRD), terutama terfokus pada

keterampilan sikap dan kemampuan produktif tenaga kerja sehingga memperlakukan manusia sebagai "Sumber untuk dimanfaatkan" (sebagai objek), dalam mencapai tujuan ekonomi, terutama dalam jangka waktu pendek. Pengembangan itu tidak terjadi dari dalam, melainkan "diatur" dari atas sesuai dengan kepentingan lingkungannya. Sebaiknya, pendidikan ini teralihkan fokusnya kepada perkembangan dan keterwujudan kemampuan manusia atau Human Capacity Development (HCD) sepanjang hayat. Yang berhak dan mampu memiliki berbagai peran dalam meraih berbagai peluang partisipasi, sebagai anggota masyarakat, orang tua, pekerja dan konsumen. Human Capacity Development (HCD) menunjukkan kontelasi keterampilan, sikap dan perilaku dalam melangsungkan hidup mencapai kemandirian, sekaligus memiliki daya saing tinggi dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi dunia.

Pendidikan Tinggi merupakan alat mencapai keterwujudan "manusia unggulan" menuju pada kinerja yang akuntabel, berkualitas, dan otonom sebagai manusia yang bermartabat. Karenanya setiap pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk mengarungi masa depannya. Untuk itu dalam

merancang perubahan pendidikan, tidaklah tepat jika hanya memikirkan generasi sekarang melainkan dua generasi yang akan datang. Yang harus dilakukan bukan hanya memperbaiki kekurangan-kekurangan dimasa lalu melainkan harus dapat mengantisipasi segala tantangan dan masalah di masa depan. Untuk itu pendidikan harus mengantisipasi dampak dan tuntutan globalisasi. Pendidikan tidak hanya sekedar mendidik menjadi tenaga siap pakai di pasar kerja, melainkan lebih daripada itu, yakni membantu peserta didik untuk menjadi “manusia seutuhnya”. Dengan demikian perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitasnya demi memenuhi kebutuhan tantangan jamannya.

Dalam upaya menjamin akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi, Dirjen Dikti melalui SK No 184/u/2001 tanggal 23 November 2001, melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap perguruan tinggi yang meliputi:

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
2. Rencana Strategis
3. Kurikulum
4. Tenaga kependidikan
5. Calon mahasiswa
6. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 - b. Ruang kuliah
 - Ruang dosen
 - Ruang seminar
 - Laboratorium
 - Perpustakaan
 - Fasilitas komputasi
 - Fasilitas teknologi informasi
 - Perlengkapan pendukung pembelajaran
 - Perlengkapan pendukung kegiatan kemahasiswaan
 - Peralatan laboratorium
 - Buku-buku dan dokumen pendukung.
7. Penyelenggaraan pendidikan yang meliputi:
 - c. Kuliah
 - Praktikum
 - Kegiatan terencana
 - Pembimbingan
 - Penilaian hasil belajar
8. Penyelenggaraan penelitian
9. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
10. Kerjasama, meliputi:
 - d. Tukar menukar sumber daya
 - Kemahasiswaan
 - Penelitian
 - Pengembangan
11. Administrasi dan pendanaan

program, meliputi:

e. Ketertiban administrasi

Pendanaan

12. Pelaporan kegiatan proses belajar mengajar

Dari 12 (dua belas) item kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perguruan tinggi tersebut, merupakan komprehensif berbagai komponen yang mendukung pelaksanaan perguruan tinggi berjalan baik. Apabila suatu perguruan tinggi dapat membuat laporan sebagaimana yang tercantum dalam SK ini, menurut penulis, merupakan cerminan perguruan tinggi tersebut sudah dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, persyaratan ini, sebagian besar PTS sangat sulit memenuhinya. Kebanyakan para PTS, khususnya di daerah belum dapat memenuhi persyaratan dengan baik. Sering kita jumpai suatu PTS dari fisik bangunannya saja tidak memadai, ditambah lagi dengan minimnya tenaga pengajar (dosen) yang memenuhi kualifikasi, baik dari segi pendidikan ataupun kewenangan mengajar (jabatan fungsional). Kebanyakan PTS di daerah sangat tergantung pada dukungan pemerintah daerah dan

mahasiswanya. Pemasukan dana diluar Pemda dan uang kuliah dari mahasiswa hampir dikatakan tidak ada. Untuk, tidak heran, apabila dalam kegiatan perkuliahan sepi mahasiswa, baru sibuk apabila menjelang ujian atau wisuda. SK Nomor 184/u/2001, telah menghapus beberapa aturan yang merupakan pengendalian dari mutu PTS, misalnya penghapusan Ujian Negara dan Akreditasi untuk program sarjana. Walaupun ujian negara dan status akreditasi perguruan tinggi, belum dapat secara objektif menjamin mutu kelulusannya, namun paling tidak secara administratif dapat dipertanggungjawabkan. Dengan keluarnya SK ini, nampaknya ada sebagian besar PTS yang menyambut gembira dan sebagian lagi kebingungan. Hal ini, dapat dimengerti, bagi PTS daerah yang kecil, tentunya akan sulit untuk dapat bersaing dengan PTS yang besar. Dengan adanya ujian negara, minimal ada lembaga lain yang menjamin mutu lulusannya, yakni Kopertis dan Perguruan Tinggi Negeri pembina. Sehingga dengan demikian, lulusannya dijamin oleh kedua Institusi tersebut. Dengan tidak adanya Ujian Negara, maka ijasahnya hanya ditanda tangani oleh pimpinan PTS setempat, yang secara psikologis belum dikenal oleh masyarakat luas. Dari segi

lain, dengan keluarnya SK ini, PTS khususnya di daerah untuk dapat segera mandiri dan melengkapi berbagai fasilitasnya, sehingga layak dikatakan sebagai suatu Perguruan Tinggi. Tanggung jawab pengelola PTS semakin besar, karena dapat dikontrol lulusannya oleh masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi PTS untuk dapat bersaing menghasilkan lulusannya yang dapat diterima oleh masyarakat dan pasar kerja. SK tersebut juga disertai dengan sanksi administratif berupa penutupan perguruan tinggi.

Dari segi pengawasan mutu suatu perguruan tinggi, SK ini sangat baik, sehingga diharapkan tidak menjamurnya pendirian PTS hanya karena peminatnya ingin mendapatkan gelar akademik saja, dengan mengabaikan mutu lulusannya. Hal ini akan berakibat pada masa yang akan datang, jumlah PTS akan menurun dan kualitas meningkat. PTS yang tidak dapat bersaing akan berguguran dan merger dengan PTS lain, sehingga pada suatu saat kualitas PTS akan meningkat. Bagi PTS daerah yang belum kuat, disarankan untuk bekerjasama dengan PTS yang lebih besar atau dengan perguruan tinggi negeri pembinanya, sehingga hubungan kemitraan tetap berjalan baik, dan

PTS tersebut mutunya tetap terjamin. Tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan datang, disetiap daerah hanya ada satu perguruan tinggi, akan tetapi mutunya terjamin baik.

Akuntabilitas suatu perguruan tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga mutu lulusannya dengan masyarakat pemakainya. Adanya "keunggulan" tertentu lulusannya, merupakan hal memberikan nilai tambah bagi lulusannya dan citra perguruan tinggi yang bersangkutan. Apalagi dalam pengembangan kurikulum sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga masa yang akan datang, kompetisi antara perguruan tinggi akan semakin ketat.

C. Standarisasi dan Kualitas PTS

Perguruan tinggi merupakan tempat dimana terjadi pendidikan dan latihan akademik yang terkait dengan profesi tertentu. Suatu profesi berkembang dan tiak statis. Hal ini berkenaan dengan pengembangan ilmu. Keterkaitan antara tuntutan kemampuan yang berubah, menjadikan perguruan tinggi makin berusaha menyesuaikan materi kurikulumnya pada tuntutan profesi tersebut. Perguruan tinggi kini tidak terlepas dari apa yang

disebut “*mass education*”, (dalam Conny R. Seniawan, 1999: 30). Yang juga di negara kita, adalah kebijakan pemerintah. Ini berarti bahwa dengan meningkatnya keragaman populasi sasaran harus dijalankan pada berbagai tingkat, dengan berbagai cara dan melalui berbagai media yang menggunakan teknologi yang canggih. Mass education memiliki fungsi membuka mobilitas sosial dari segmen populasi yang lebih luas. Ciri yang bersifat pragmatis ini juga membawa konsekuensi bahwa mobilitas sosial tersebut menuntut kesesuaian jumlah sumber daya manusia yang disiapkan untuk sejumlah pekerjaan tertentu. Menurut Conny R. Seniawan (1999: 31), keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara yang harus dilayani (*supply*) dengan yang dituntut (*demand*) mematok “*mati*” (*locked*) pengembang kemampuan manusia dalam memekarkan potensi manusia seoptimal mungkin untuk “*eventually*” menciptakan pekerjaan itu sendiri.

Kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan perguruan tinggi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus menerus berubah dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam SK Mendiknas No 184/u/2001, suatu perguruan

tinggi wajib mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1. Kegiatan pembelajaran meliputi:

f. Jumlah mahasiswa

Jumlah dosen tetap dan tidak tetap yang aktif mengajar

Jadwal perkuliahan dan praktikum

Garis-garis besar program pengajaran (GBPP)

Satuan acara perkuliahan (SAP)

Kehadiran dosen

Kehadiran mahasiswa dalam kuliah

Praktikum dan ujian

Nilai ujian

Salinan/foto copy ijazah

Transkrip akademik yang dihasilkan untuk keperluan penilaian

2. Kegiatan penelitian meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi berupa karya-karya ilmiah, makalah, hasil seminar, dan sejenisnya.

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan sejenisnya.

Dari berbagai kegiatan pendokumentasian tadi yang meliputi tri dharma perguruan tinggi, menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut sebagai lembaga yang memperhatikan berbagai

penomena yang tumbuh didalam masyarakat, tempat ia menjadi bagiannya.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, perguruan tinggi ditentukan oleh 2 (dua) faktor yang dominan, yaitu mutu pengelolaan para pimpinan dan mutu pendukung pelaksana, baik mahasiswa maupun mutu dosen. Dari sisi ini, mudah dipahami bahwa peningkatan mutu perguruan tinggi berpusat pada peningkatan mutudosen.

Apabila dikaji secara mendalam, mutu dosen PTS di daerah sangat jauh dari harapan. Selain dari kualifikasi pendidikan yang kurang memadai juga tidak ditunjang dengan sarana pendukung akademik yang memadai, misalnya perpustakaan yang lengkap. Hal ini mengakibatkan bahan perkuliahan dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan dan bersifat statis. Dapat dibayangkan bagaimana kualitas hasil lulusannya.

Untuk itu perlu kiranya kedepan ada standarisasi mutu suatu perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh masyarakat saja, melainkan oleh suatu lembaga yang independen dan berwibawa sehingga putusan yang diambilnya merupakan representasi dari

keadaan yang sebenarnya. Selama ini badan yang demikian ada, akan tetapi hasilnya seringkali memberikan pertanyaan yang sulit untuk menjawabnya.

Dengan adanya standarisasi dan kualitas PTS diharapkan kedepan tidak terjadi lagi praktek jual (obral) gelar akademik secara vulgar sehingga wibawa pemegang gelar tersebut tidak ada, atau kalau perlu dibuat undang-undang yang melarang penggunaan gelar akademik oleh orang yang tidak berhak, dengan alasan apapun. Masyarakat Indonesia yang dapat menikmati perguruan tinggi sangat terbatas jumlahnya. Untuk itu standarisasi mutu pengelolaan perguruan tinggi dirasakan sangat perlu dan mendesak untuk diadakan.

Harapan masyarakat terhadap Departemen Pendidikan Nasional, khususnya Dikti untuk menerapkan dan mengimplementasi lebih jauh pengawasan dan pengendalian perguruan tinggi sangat besar. Ketegasan Dikti untuk menerapkan aturan dengan benar disertai sanksi yang tegas, dapat mempercepat peningkatan kualitas suatu perguruan tinggi, khususnya PTS yang ada di daerah.

D. Pengembangan PTS di Daerah

Dalam rangka kebijakan

pemerataan pendidikan, pengembangan PTS di daerah merupakan ujung tombaknya. Dengan terdapatnya PTS di daerah, secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia di daerah. Untuk itu diperlukan pembinaan yang benar dan intensif sehingga keberadaan PTS di daerah itu betul-betul bermanfaat bagi pengembangan daerahnya. Selama ini yang terjadi, justru sebaliknya. PTS di daerah melakukan kegiatan akademiknya tidak ada yang mengendalikan, sehingga lepas dari pengendalian pihak berkompeten dalam melakukan kegiatannya. Diharapkan dengan adanya SK Mendiknas No 184/u/2001 ini, Kopertis dapat lebih melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan harapan kita semua.

Pengembangan PTS di daerah dapat dilakukan dengan cara mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di daerah, misalnya: Pemerintah Daerah, pihak swasta, tokoh masyarakat, disamping itu dilakukan kerja sama dengan PT yang dianggap dapat "membina"nya, tanpa merasa menjadi pesaingnya. Dengan adanya keterkaitan antara PTS dengan masyarakat di daerah itu, maka perguruan tinggi

tersebut akan selalu mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga masyarakat merasa ikut dan bertanggung jawab terhadap kemajuan perguruan tinggi tersebut.

Adanya rasa kebanggaan masyarakat memiliki perguruan tinggi setempat, menunjukkan kepercayaan masyarakat akan mutu lulusannya: mutu lulusan perguruan tinggi sangat tergantung pada pengelolaan atau manajemen perguruan tinggi tersebut. Untuk itu tidak heran, kalau disetiap kota/kabupaten, khususnya di Jawa Barat, paling tidak ada sebuah perguruan tingginya.

Keberadaan perguruan tinggi daerah inilah yang merupakan tantangan bagi pihak Dikti agar tetap "exis" ditengah-tengah era persaingan yang semakin tajam ini. Selama Dikti dapat membinanya dengan baik, selama itu pula keberadaan perguruan tinggi tersebut tetap ada. Untuk itu perlu kiranya difikirkan kembali cara pembinaan yang efektif sehingga dengan adanya SK Mendiknas ini dapat menjamin untuk hidup PTS yang kecil, sehingga PTS ini menjadi besar dan berkembang seiring dengan pembangunan yang berkembang di daerahnya.

E. Penutup

Pengelola Perguruan Tinggi

dituntut untuk memenuhi akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Adanya otonomi yang lebih luas pada perguruan tinggi harus disikapi dengan adanya tanggung jawab dari pengelola perguruan tinggi. Dengan adanya SK Mendiknas No 184/u/2001, diharapkan dapat meningkatkan kualitas suatu perguruan tinggi, yang tercermin dari lulusannya yang dapat diterima dan diserap oleh pasar kerja. Kemandirian PTS merupakan keberhasilan pemerintah dalam membina PTS yang bersangkutan. Perguruan tinggi yang menang dalam persaingan adalah perguruan tinggi yang dapat mengikuti perkembangan jaman dan dinamika ilmu pengetahuan. Kondisi akademik yang kondusif sangat menunjang keberhasilan suatu perguruan tinggi menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Paradigma baru perguruan tinggi merupakan harapan sekaligus tantangan untuk dapat mewujudkannya menuju masyarakat adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Conny. R. Semiawan, 1999. *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- H. A. R. Tilaar, 2001. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Penerbit PT

Remaja Rosda Karya, Bandung.

Muchtar Buchari. 2001, *Pendidikan Antisipatoris*, Penerbit Kanisius.

Sanusi Uwes. 1999, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, PT Logos Wacana Ilmu.

SK. Mendiknas, Nomor 184/U/2001 tentang *Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi*.